

Periode April-Juni 2020 | edisi 26

MEMBANGUN KEMBALI INDUSTRI & MASYARAKAT YANG LEBIH TANGGUH PASCAPANDEMI

Jakarta-Indonesia Climate Change Trust Fund bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan World Resources Institute (WRI) Indonesia, melaksanakan webinar bertema "Membangun Kembali Industri & Masyarakat yang Lebih Tangguh Pascapandemi" yang akan diselenggarakan pada Jumat, 15 Mei 2020.

Kegiatan ini menyoroti pentingnya ketangguhan pada sektor kelautan dan perikanan serta meminimalisir dampak dari resiko krisis akibat pandemi Covid-19. Diskusi ini membahas mengenai strategi pemulihan ekonomi dan memperkuat ketangguhan masyarakat di sektor kelautan dan perikanan pascapandemi.

Beberapa pengaruh Covid-19 terhadap sektor kelautan dan perikanan di antaranya adalah penurunan produksi dan terganggunya rantai pasok akibat sosial dan *physical distancing*, serta beberapa wilayah yang mengalami pembatasan akses sementara. Hal ini berdampak tidak hanya pada pebisnis besar, namun juga keseluruhan rantai pasok termasuk pengiriman produk ikan, pakan, hingga akses pasar nelayan/petambak tradisional. Tak hanya itu, dibahas pula mengenai pentingnya ketangguhan pada sektor kelautan dan perikanan untuk meminimalisir dampak dari krisis lainnya yang mungkin terjadi di masa depan.

Keynote Speaker



Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, MSc
Deputi Bidang Kemaritiman & Sumber Daya Alam
Bappenas

Narasumber



Dr. Ir. Sri Yanti JS, MPM
Direktur Kelautan dan Perikanan
Bappenas



Kurnia Yuniakhir
Kepala Bagian Pengawasan
Otoritas Jasa Keuangan



Gibran Huzafah
CEO
E-Fishery



Arief Wijaya
Manajer Senior Iklim & Hutan
WRI Indonesia

**JUMAT,
15 MEI 2020
10.00 - 11.30 WIB**

MODERATOR



Dr. Tonny Wagey
Executive Director ICCTF

Deputi Bidang Kemaritiman & Sumber Daya Alam Bappenas, Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, MSc menyampaikan bahwa pandemik menyadarkan kita untuk kembali mendefinisikan hubungan dengan alam. Mengingatkan kita bahwa pandemik ini merupakan akibat dari rusaknya sumber daya alam dan habitatnya. Eksploitasi berlebihan pada sumberdaya alam di darat dan laut mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menjadi salah satu penyebab munculnya pandemik.

Sebagai respon menghadapi pandemik, diberlakukanlah pembatasan aktivitas yang menyebabkan terhambat dan terhentinya kegiatan. Disrupsi *supply chain* produk pangan pada bidang perikanan, dalam waktu lama dapat menimbulkan krisis pangan pada skala lebih besar.

Pada sektor perikanan, disrupsi terhadap aktivitas manusia dalam masa pandemik banyak membawa kerugian secara ekonomi terhadap beberapa sektor seperti: (1) pariwisata; (2) perikanan; dan (3) jasa kelautan lainnya. Pandemi ini memang merugikan perekonomian, namun juga memberi dampak positif yaitu menurunnya tingkat eksploitasi sumber daya alam diharapkan dapat menciptakan *effect refugia* bagi sumber daya dalam pemulihan stok dan kondisi lingkungan secara umum.

PENYUSUNAN CONCEPT NOTE BLUE CARBON "A BLUE CARBON ECONOMY APPROACH TOWARD SUSTAINABLE AQUACULTURE IN INDONESIA"

Dalam lingkup window Blue Carbon, ICCTF melakukan diskusi rencana kerjasama lainnya dengan mitra pembangunan Asian Development Bank (ADB) dengan judul "A Blue Carbon Economy Approach Toward Sustainable Aquaculture in Indonesia".

ICCTF telah menyusun dokumen awal berupa *concept note* yang mencakup latar belakang informasi mengapa Blue Carbon menjadi isu penting di dalam perubahan iklim, perencanaan dan kebijakan pemerintah.

Untuk rincian usulan proyek, durasi diusulkan berlangsung selama 3-5 tahun (dimulai di tahun 2021) dengan lokasi target di wilayah Sumatera, Sulawesi, Jawa, Kalimantan dan Papua.

Adapun hasil yang diharapkan mencakup pertama, pengembangan pertambakan udang konvensional menjadi pertambakan berkelanjutan yang rendah emisi dan tersertifikasi di 5 lokasi prioritas. Kedua, peningkatan cadangan karbon melalui perbaikan ekosistem mangrove di area pertambakan udang. Tindak lanjut dari penyusunan *concept note* ini yakni penyempurnaan *concept note* dan pembahasan dengan pemangku kepentingan lainnya.



FINALISASI DAN PENGESAHAN PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS HIBAH PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM



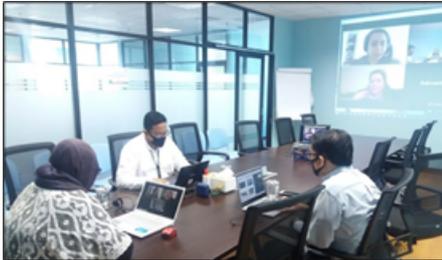
Periode April hingga Juni 2020 ICCTF-Bappenas melakukan beberapa pertemuan untuk memfinalisasi dan memperoleh pengesahan untuk dokumen Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Penanggulangan Perubahan Iklim. Pada tanggal 8 April 2020, Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Penanganan Perubahan Iklim ditandatangani oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dan resmi diundangkan melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020.

Sebagai dokumen turunan dari Pedoman Umum tersebut, Petunjuk Teknis telah ditetapkan oleh Deputi Bidang KSDA, Kementerian PPN/ Bappenas pada tanggal 11 Juni 2020. Dengan disahkannya kedua dokumen ini, Coralreef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) dengan dana hibah dari Bank Dunia akan menggunakan dua dokumen ini sebagai acuan implementasi program.

SEKILAS KARBON BIRU

Blue carbon atau karbon biru adalah istilah untuk karbon yang terasingkan, disimpan atau dihasilkan ekosistem laut dan pesisir, termasuk hutan mangrove, padang lamun dan rawa payau. Selain berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim, ekosistem karbon biru juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir. Ekosistem karbon biru dapat mencegah erosi, melindungi rumah penduduk dari badai, menangkap polutan dan menyediakan habitat bagi spesies yang penting secara komersial. Rangkaian manfaat tersebut juga dapat menunjang perkembangan pariwisata lokal dan menyediakan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat pesisir. Indonesia telah pengembangan RPJMN 2020-2024 yang menyertakan karbon biru dalam inisiatif pembangunan rendah karbon.

KERJASAMA DENGAN DEPARTMENT OF INDUSTRY, INNOVATION, SCIENCE AND RESOURCES (DISER), AUSTRALIA



Inisiasi Blue Carbon pada periode April-Juni 2020 ini diawali dengan kerjasama antara ICCTF - Bappenas, Kemenkomarves dengan *Department of Industry, Science, Energy and Resources (DISER)* Australia dalam *The Indonesia-Australia Blue Carbon Program*.

Sebagai dampak dari pandemi Covid-19, seluruh kegiatan tatap muka diputuskan untuk ditunda sementara waktu dan diganti dengan pertemuan-pertemuan virtual.

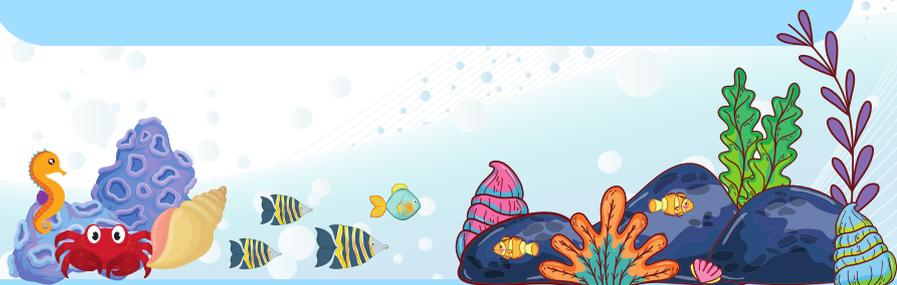
Guna merumuskan strategi tindak lanjut, ICCTF beberapa kali melaksanakan rapat virtual dengan DISER, kegiatan seperti *Policy Training* diputuskan ditunda hingga akhir tahun 2020 ini, sedangkan *High Level Policy Dialogue* rencananya akan dilaksanakan secara virtual pada September 2020.

Untuk mempersiapkan agenda *High Level Policy Dialogue* ini maka dilaksanakan *pre-meeting Blue Carbon* yang akan mewadahi perwakilan dari pusat dan daerah untuk berdiskusi terkait pengelolaan ekosistem pesisir dan laut yang berbeda-beda di setiap lokasi. Ide dan masukan yang ditampung dalam *Pre-meeting Blue Carbon* tersebut akan menjadi bahan diskusi pada *High Level Policy Dialogue*.

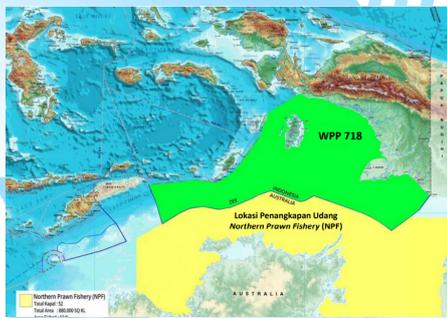
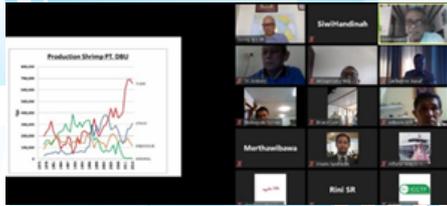
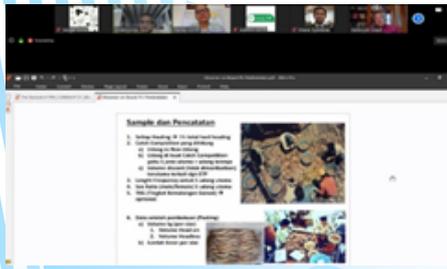
Rencananya, setelah *High Level Policy Dialogue* akan dilaksanakan *Program Committee Meeting*. Kegiatan ini akan dihadiri peserta terbatas yang mencakup perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkomarves, KKP, KLHK, LIPI, BIG, LAPAN, DISER dan CSIRO, dengan fokus tujuan yaitu penyusunan *Roadmap Blue Carbon* di Indonesia.

RANGKAIAN KEGIATAN ICCTF TRIWULAN KEDUA 2020

Waktu	Kegiatan
09 April 2020	Rapat Pembahasan Langkah Strategis Persiapan Pelaksanaan Project Lautra
13 April 2020	Rapat Pembahasan Blue Carbon dengan WRI
24 April 2020	Pembahasan lanjutan tentang konsep Blended Finance dengan Rare dan Bloomberg
24 April 2020	Pembahasan konsep rencana kerjasama Blue Carbon dengan WRI
04 Mei 2020	Diskusi Lanjutan terkait Blended Finance dengan BLU-LPMUKP
05 Mei 2020	Pembahasan LAUTRA dengan KKP
06 Mei 2020	Pembahasan Lanjutan Blue Carbon
06 Mei 2020	Pembahasan Lanjutan Konsep Blended Finance dengan WB
08 Mei 2020	Pembahasan Lanjutan Blue Carbon dengan WRI
08 Mei 2020	Buka Bersama Ibu Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas
13 Mei 2020	Rapat Koordinasi Pembahasan MFFI dan BLU-LPMUKP
15 Mei 2020	Webinar "Membangun Kembali Industri & Masyarakat yang Lebih Tangguh Pasca Pandemi"
15 Mei 2020	Diskusi kebijakan Pemutakhiran Akun Khusus COVID-19
19 Mei 2020	Diskusi Lanjutan Kerjasama Blended Finance dengan BLU-LPMUKP
26 Mei 2020	Pembahasan MOU dengan BLU-LPMUKP
27 Mei 2020	Wrap Up Meeting Implementation Support Mission COREMAP - CTI
28 Mei 2020	Halal Bihalal Keluarga Besar ICCTF
02 Juni 2020	Undangan Rapat Pembahasan Juknis Bantuan Pemerintah untuk Perubahan Iklim dari Biro Hukum
04 Juni 2020	Rapat Blue Carbon
09 Juni 2020	Pertemuan pembahasan Kerangka Blended Finance dan inisiasi kerjasama dengan BLU
18 Juni 2020	Rapat Pembahasan Rencana Strategis Blended Finance
18 Juni 2020	Bimbingan Teknis Pengiputan Data Kas Hibah pada Aplikasi SAKTI
25 Juni 2020	International Maritime Webinar Series Session III: Livelihood & Marine Conservation



PENELITIAN BIOEKONOMI PERIKANAN UDANG DI WPP 718



ICCTF bersama dengan Bappenas melaksanakan rangkaian kegiatan kegiatan Penelitian Bioekonomi terfokus pada persiapan pengambilan data primer yang sedang dilakukan di 2 kapal Himpunan Pengusaha Penangkapan Udang Indonesia (HPPI) oleh observer dari Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, serta pengumpulan data sekunder dari data *record* perusahaan.

Kegiatan pembekalan dilakukan pada tanggal 20-21 April 2020 dengan tujuan untuk menyamakan persepsi tentang proses pengumpulan data dan juga memastikan observer dan kru kapal memahami proses pengambilan data beserta metode yang digunakan. Dalam pembekalan ini juga disepakati mekanisme transfer Taruna antar kapal survey dan juga proses pengumpulan data yang sudah didapat selama survey. Survey akan dilakukan selama 2 bulan atau 60 hari untuk masing-masing kapal survey.

Selanjutnya beberapa pertemuan dilakukan untuk harmonisasi data sekunder yang diperoleh dari perusahaan anggota HPPI. Harmonisasi data ini dibutuhkan untuk bisa mendapatkan data dan variabel yang bisa digunakan dalam penghitungan model bioekonomi serta memastikan data-data yang belum ada bisa diperoleh dari perusahaan. Data yang digunakan sebagai data sekunder adalah data tahun 2012 - 2015.

Pengambilan data primer di kapal survey oleh *observer* dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong dilakukan mulai tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan Juli 2020. Dua kapal anggota HPPI dengan 4 taruna sebagai observer melakukan pengambilan data di lokasi penangkapan yang dalam 5 tahun terakhir diasumsikan tidak ada penangkapan udang. Data primer ini akan menjadi data verifikasi sekaligus data terbaru tentang kondisi sumber daya udang di WPP 718. Tim ICCTF-Bappenas juga mengadakan beberapa pertemuan untuk pembahasan data dan harmonisasi pengolahan data kajian Bioekonomi selama bulan Juni 2020.

PARTISIPASI DALAM PROYEK ECO-FISHING PORT DENGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (KKP) DAN AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPMENT (AFD)

Proyek Eco-Fishing Port merupakan inisiasi kerjasama antara KKP dan AFD yang telah dirumuskan sejak tahun 2014, namun tertunda dalam implementasinya. Pada tahun 2020 ini, para pihak berkomitmen kembali untuk melanjutkan inisiasi kerjasama tersebut. Bersamaan dengan hal itu, kerjasama kali ini mengikutsertakan partisipasi Kementerian PPN/Bappenas dalam pemanfaatan dan implementasi komponen hibah, sebagaimana disepakati pada pertemuan di kantor pusat AFD Paris pada tahun 2019 silam.

Pada pertemuan yang diadakan secara daring di tanggal 19 Juni 2020, ketiga pihak setuju untuk melanjutkan kerjasama serta menyepakati langkah-langkah strategis yang perlu diambil. AFD akan melakukan koordinasi dengan tim di Manila untuk melakukan pengkajian kembali terhadap hasil feasibility study yang telah dimiliki, serta persiapan pelaksanaan survey environmental and social safeguard. Terkait dengan obyektif komponen hibah, para pihak sepakat untuk memajukan peran ekosistem kritis seperti ekosistem mangrove dalam membangun pelabuhan perikanan yang ramah lingkungan. Langkah berikutnya dari perumusan kerjasama ini adalah pemilihan target lokasi pelabuhan serta pertemuan lanjut dengan konsultan AFD di Jakarta.

PENGEMBANGAN PROPOSAL CALON MITRA PELAKSANA COREMAP-CTI BANK DUNIA



Persiapan implementasi program Coral Reef Rehabilitation and Management Program - Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) atau dikenal dengan Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang - Prakarsa Segitiga Karang dengan dana hibah dari Bank Dunia (World Bank) dilakukan melalui pendampingan pengembangan proposal mitra pelaksana untuk setiap paket kegiatan yang akan dilaksanakan di bawah proyek COREMAP-CTI dana hibah Bank Dunia.

Pendampingan dilakukan dalam bentuk review dan diskusi yang dilakukan antara tim Program Implementing Unit (PIU) COREMAP-CTI Bank Dunia dengan tim mitra pelaksana. Kegiatan pengembangan proposal ini dimulai pada Maret 2020 sampai dengan Juni 2020. Calon mitra pelaksana menyiapkan Kerangka Kerja Logis (*logical-framework*) yang akan menjadi acuan dalam mengukur capaian implementasi kegiatan, serta dokumen pendukung lainnya seperti Rencana Biaya, Proses perencanaan, Kerangka Acuan Kegiatan, Rencana Aksi Lingkungan dan Sosial, dan Rencana Pengadaan Barang dan Jasa.

Dalam proses pendampingan ini juga dijelaskan beberapa hal terkait dengan prosedur pengadaan dan aturan yang digunakan serta dokumen yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana biaya selain dari penjelasan tentang Kerangka Perlindungan Lingkungan dan Sosial/Environmental and Social Safeguard Framework (ESSF). Mitra pelaksana telah mengikuti Workshop Finalisasi Project Document Paket Hibah COREMAP-CTI Bank Dunia pada 10 Juni 2020 serta Workshop Pengenalan dan Pemaparan Project Document Mitra Pelaksana COREMAP-CTI Bank Dunia pada 11 Juni 2020. Sampai dengan akhir Juni 2020, masing-masing mitra pelaksana (lima lembaga) sudah melakukan lebih dari tiga kali pertemuan untuk diskusi dan review.

Pengembangan proposal sudah mencapai tahapan akhir (finalisasi kerangka acuan logis & dokumen lainnya) yang diharapkan dapat dilakukan pada Juli 2020. Kegiatan pengembangan proposal ini menjadi kegiatan utama COREMAP-CTI dengan dana hibah dari Bank Dunia pada periode April-Juni 2020 ini.

Rencana implementasi program COREMAP-CTI pada periode ini belum dapat terlaksana karena proses pengembangan proposal masih dilakukan dan masih dalam persiapan untuk penandatanganan surat perjanjian kerja sama yang menjadi dasar dalam implementasi rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang. Selanjutnya, akan dilakukan workshop pengenalan prosedur untuk mitra pelaksana (*induction*) yang direncanakan akan dilakukan pada Juli 2020.

DUKUNGAN PELAKSANAAN COREMAP-CTI BANK DUNIA

Dukungan implementasi Coral Reef Rehabilitation and Management Program - Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) dilakukan pada 13-14 Mei 2020 oleh Bank Dunia. Misi ini bertujuan untuk meninjau perkembangan implementasi program COREMAP-CTI dengan dana hibah Bank Dunia. Berbeda dengan misi sebelumnya, misi kali ini dilakukan dalam bentuk *virtual meeting* sebagai penerapan pembatasan untuk berkumpul, yang merupakan salah satu protokol pencegahan penyebaran Covid-19. Kegiatan ini menghasilkan Aide Memoire yang akan menjadi salah satu referensi dalam implementasi program.

COREMAP-CTI ASIAN DEVELOPMENT BANK

Perubahan Perjanjian Hibah dan Pinjaman (*Amendment Grant and Loan Agreement*) yang telah disepakati oleh Pemerintah Indonesia dengan Asian Development Bank (ADB) menjadi titik awal efektifnya waktu pelaksanaan Coral Reef Rehabilitation and Management Program - Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) dengan dana hibah dari ADB. Menyikapi hal ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas selaku *Executing Agency* mengakselerasi proses penyusunan *Terms of Reference* (TOR) paket kegiatan dan proses lanjutnya yaitu pengadaan paket kegiatan.



Selama periode April-Juni 2020 beberapa diskusi telah dilaksanakan mulai dari diskusi terkait Draft TOR *Grant Package-1 and Cost Tab* (Nusa Penida) dengan ADB yang dilaksanakan pada 2 April 2020 hingga Rapat Persiapan Proses Pengadaan Hibah COREMAP-CTI Asian Development Bank pada 20 April 2020.

Setelah mendapatkan *No Objection Letter* (NOL) atas TOR Paket 1 *Support for Marine Protected Area Management and Endangered, Threatened, Protected Species National Plan of Action Implementation in Nusa Penida* (Dukungan untuk Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut dan Implementasi Rencana Aksi Nasional Spesies yang Hampir Punah, Terancam, Dilindungi di Nusa Penida) yang diterbitkan oleh ADB maka dilanjutkan ke proses pelelangan untuk mencari mitra pelaksana. Selain itu, proses untuk mempersiapkan 6 paket kegiatan lainnya masih terus berjalan secara paralel.

Beberapa rangkaian kegiatan dilakukan dalam penyusunan tujuh TOR paket kegiatan COREMAP-CTI dana hibah ABD. Pertama, diskusi terkait TOR Paket 1 *Support for MPA management and ETP NPOA implementation in Nusa Penida* telah dilakukan untuk meninjau kembali kesesuaian kegiatan-kegiatan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat. TOR Paket 1 telah selesai dan mendapatkan persetujuan Asian Development Bank pada tanggal 29 April 2020. Pembahasan Pengadaan Grant Package 1 ADB dilakukan pada 11 Mei 2020 dan proses pengadaan untuk Paket 1 telah dimulai di akhir Juni 2020.

Kedua, diskusi terkait dengan TOR kegiatan Pengembangan Kapasitas untuk Meningkatkan Badan Pengelola Kawasan Konservasi Laut melalui Program Magister (*Capacity Development to Enhance Marine Protected Area Management Body through a Linkage Master Degree Program*) rutin dilakukan dalam beberapa sesi pada bulan April hingga Juni 2020. Pertemuan secara virtual juga telah dilakukan dengan The University of Queensland, Australia pada 16 April 2020. Rencana kegiatan ini masih didiskusikan lebih lanjut terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatan, TOR kegiatan dan pengaturan kerjasama antara Kementerian PPN/Bappenas, ICCTF, Institut Pertanian Bogor dan University of Queensland.



INISIASI BLUE FINANCE

ICCTF menggiatkan inisiasi kerjasama dalam lokus pembiayaan campuran (*blended finance*) untuk memobilisasi konsep pendanaan inovatif sektor kelautan dan perikanan. Perwujudan *blue economy* merupakan cita-cita besar untuk Indonesia sebagai negara dengan sumber daya maritim yang berlimpah. Kementerian PPN/Bappenas dan ICCTF sebagai Insiator dari *blended finance* di sektor kelautan dan perikanan, berkomunikasi dengan Bank Dunia untuk merumuskan kerjasama ini dengan mengadakan beberapa pertemuan virtual selama April 2020.



Untuk mengembangkan pengetahuan dan kapasitas dari pemangku kepentingan mengenai jenis pendanaan ini, pihak Bank Dunia bermaksud mendukung pemerintah Indonesia melalui program *Blue Finance Activity Project under Problue Support*, yang kegiatannya difokuskan untuk mempersiapkan penyusunan buku putih dan peta jalan dalam rangka memobilisasi implementasi *blended finance*. ICCTF telah memiliki konsep *Sustainable Blue Financing Institution* yakni konsep/skema awal implementasi *blended finance* di sektor Kelautan dan Perikanan.

APA ITU BLENDED FINANCE?

Blended finance atau pembiayaan campuran merupakan pendekatan strukturisasi yang memungkinkan organisasi dengan tujuan berbeda untuk berinvestasi bersama satu sama lain sambil mencapai tujuan masing-masing (misalnya keuntungan finansial, dampak sosial, atau perpaduan keduanya). Pembiayaan campuran menciptakan peluang yang dapat diinvestasikan di negara berkembang yang mengarah pada dampak pembangunan yang lebih besar. Pembiayaan campuran bukanlah pendekatan investasi, instrumen, atau solusi akhir.



Konvergensi berfokus pada keuangan campuran di negara berkembang. Negara berkembang menghadapi tantangan yang signifikan termasuk tingkat akses yang rendah ke air bersih dan layak konsumsi, sanitasi dan kebersihan, kemiskinan energi, tingkat polusi yang tinggi, tingginya angka penyakit tropis dan infeksi, dan kurangnya infrastruktur fisik. Salah satu karakteristik utama dari pembiayaan campuran adalah transaksi pembiayaan berkontribusi untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Secara keseluruhan, transaksi dari pembiayaan campuran diharapkan menghasilkan keuntungan finansial yang positif. Investor yang berbeda dalam struktur keuangan campuran akan memiliki ekspektasi pengembalian yang berbeda, mulai dari keuntungan yang ringan hingga mengikuti harga pasar. Pendanaan publik dan/atau filantropi adalah 'pemicu'. Partisipasi dari pendanaan publik dan filantropi meningkatkan profil risiko/pengembalian transaksi guna menarik partisipasi dari pihak swasta.

